

ABSTRAK

KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

Fitri Windasari

Kekerasan yang menetapkan anak sebagai korban baik *bullying*, pelecehan seksual, eksploitasi, *trafficking* menunjukkan perlindungan anak di Indonesia belum maksimal. Proses pengelolaan pemerintahan dengan melibatkan *civil society* melalui kemitraan dinilai sebagai potensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) bermitra dengan *Non Government Orgazation* (NGO) Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lembaga Dana Atmaja (YPSK-LDA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menganalisis proses pada pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan NGO YPSK-LDA dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pringsewu dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses kemitraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu dan NGO YPSK-LDA. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA termasuk ke dalam pola kemitraan mutualistik. Didasarkan pada kriteria-kriteria pola kemitraan dan tahapan proses kemitraan. 1) Permasalahan anak yang meningkat, keterbatasan tenaga dan SDM, Komitmen mewujudkan KLA. 2) Visi misi selaras, legalitas jelas. 3) Berperan membantu pemerintah, program konsen layanan anak. 4) Kesepakatan percepatan KLA. 5) Enam program dilakukan bersama. 6) Pelaksanaan pencegahan, penanganan, rehabilitasi. 7) Evaluasi *Learning and Reftrun*. Kemitraan dijalankan dengan saling menguntungkan, visi misi selaras, saling membutuhkan terlihat dalam hasil proses kemitraan. Kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA dinilai berhasil yang dipengaruhi oleh terpenuhinya faktor indikator proses yakni dilakukan pertemuan dan perlibatan kedua pihak, *output* yakni terlaksana 6 program dilakukan bersama, *outcome* yakni kasus kekerasan anak rendah di 8 desa dampingan selama 5 tahun terakhir. Indikator input satu dari tiga variabel belum terpenuhi yaitu tim atau sekretariat.

Kata Kunci : Kemitraan, Kekerasan Anak, Pringsewu

ABSTRACT

PARTNERSHIP BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN MANAGING CHILDREN VIOLENCE IN PRINGSEWU DISTRICT

By

Fitri Windasari

Violence that defines children as victims of bullying, sexual harassment, exploitation, trafficking shows that child protection in Indonesia has not been maximized. The government management process by involving civil society through partnerships is considered as potential. Pringsewu District Government, Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning (P3AP2KB) partnered with Non Government Organization (NGO) Catholic Social Development Foundation Atmaja Fund Institute (YPSK-LDA) in overcoming violence against children. This study analyzes the process of the partnership pattern between Regional Government and the YPSK-LDA NGO in overcoming violence against children in Pringsewu Regency and analyzes the factors that influence the success or failure of the partnership process. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted at the P3AP2KB Office of Pringsewu Regency and the NGO YPSK-LDA. Based on the results of the study, it was concluded that the partnership between the Pringsewu District Government and the YPSK-LDA NGO was included in a mutualistic partnership pattern. Based on the criteria for the partnership pattern and the stages of the partnership process. 1) Increased child problems, limited manpower and human resources, Commitment to realizing KLA. 2) Vision and mission are aligned, legality is clear. 3) Play a role in helping the government, children's service consent program. 4) KLA acceleration agreement. 5) Six programs are carried out together. 6) Implementation of prevention, treatment, rehabilitation. 7) Evaluation *Learning and Refrun*. Partnerships are run with mutual benefits, vision and mission are aligned, mutual need is seen in the results of the partnership process. The partnership between the Pringsewu District Government and the YPSK-LDA NGO was considered successful which was influenced by the fulfillment of process indicator factors, such as meetings and involvement of both parties, the output was that 6 programs were carried out together, the outcome was cases of low child violence in 8 assisted villages for the last 5 years. The input indicator of one of the three variables has not been met, such as the team or the secretariat.

Keywords: Partnership, Child Violence, Pringsewu